

ANALISIS FENOMENA HOAKS DAN MISINFORMASI DALAM PERSPEKTIF ETIKA KOMUNIKASI ISLAM: URGENSI PRINSIP TABAYYUN DI ERA DIGITAL

Zuriani Putricia

Pendidikan Agama Islam, Universitas Singaperbangsa Karawang, Indonesia

2510631110168@student.unsika.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Diterima: 07-05-26

Disetujui: 13-05-26

Kata Kunci:

Hoaks;

Misinformasi;

Tabayyun;

etika komunikasi

Islam;

Abstract: *The proliferation of hoaxes and misinformation in the digital age has become a critical challenge, threatening both social stability and moral integrity. This phenomenon arises from the massive influx of information that is not balanced with adequate digital literacy and communication ethics. This research aims to analyze the problems of hoaxes and misinformation from an Islamic perspective and examine the principle of tabayyun as a verification mechanism. Employing a qualitative approach through library research, this study gathers data from various primary and secondary literatures. The findings indicate that Islam strongly underscores honesty as the fundamental pillar of communication. The implementation of the tabayyun principle is not merely a cognitive activity but a manifestation of akhlakul karimah (noble character), serving as a bulwark against the destructive impacts of fake news within society.*

Abstrak: Penyebaran hoaks dan misinformasi di era digital telah menjadi tantangan serius yang mengancam stabilitas sosial dan integritas moral. Fenomena ini muncul akibat banyaknya arus informasi yang tidak di barengi dengan literasi digital dan etika berkomunikasi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika hoaks dan misinformasi dari sudut pandang islam serta mengkaji prinsip tabayyun sebagai verifikasi. Menggunakan metode studi pustaka dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini mengumpulkan data dari berbagai literatur primer dan sekunder. Hasil kajian menunjukkan bahwa Islam sangat menekankan kejujuran sebagai fondasi komunikasi. Implementasi prinsip tabayyun bukan sekadar aktivitas kognitif, melainkan manifestasi dari akhlakul karimah yang berfungsi sebagai benteng terhadap dampak destruktif berita bohong di masyarakat.

◆

PENDAHULUAN

Di era digital yang semakin pesat, internet dan media sosial telah bertransformasi menjadi kebutuhan pokok yang nyaris mustahil dipisahkan dari aktivitas harian kita. Lonjakan angka penetrasi internet di Indonesia memperlihatkan pergeseran budaya yang sangat drastis dalam cara masyarakat berkomunikasi. Berdasarkan data dari *Global Digital Reports 2026*, Indonesia menempati posisi ke-16 dunia dalam hal durasi penggunaan media sosial. Masyarakat Indonesia menghabiskan waktu rata-rata 3 jam 7 menit setiap harinya di platform digital, angka yang signifikan lebih tinggi dibandingkan rata-rata global yang sebesar 2 jam 39 menit. Selisih durasi hampir 30 menit ini mengindikasikan tingkat ketergantungan yang tinggi terhadap gawai dalam kehidupan sehari-hari. Kondisi ini secara otomatis mengubah wajah konsumsi media kita; publik kini tidak lagi sekadar menjadi audiens pasif, melainkan sudah menjelma menjadi pendistribusi informasi yang sangat aktif.

Sayangnya, kemudahan ini ibarat pisau bermata dua karena memicu ledakan volume data atau *information overload* yang justru menyesakkan.

Konsep *The Law of Diminishing Return* dalam konteks kognitif menjelaskan bahwa paparan informasi yang berlebihan secara terus-menerus justru kontraproduktif bagi proses belajar. Menurut Johnson (2005), ketika ambang batas penerimaan informasi terlampaui, tambahan data tidak lagi memperluas wawasan seseorang, melainkan memicu tekanan mental, kelelahan, serta hambatan dalam mengolah informasi. Celah psikologis inilah yang membuat banyak orang menjadi reaktif dan membagikan konten hanya karena terpancing judul yang heboh tanpa melakukan verifikasi. Di sinilah fenomena hoaks merayap masuk sebagai ancaman serius. Secara akademis, Irhamdhika (2022) mengemukakan bahwa hoaks pada dasarnya adalah informasi yang belum terverifikasi atau tidak selaras dengan realitas, mencakup segala bentuk perilaku yang sengaja dirancang untuk menyesatkan persepsi orang lain di ruang publik.

Dampak dari "wabah" berita bohong ini nyatanya merusak jauh lebih dalam daripada sekadar kebingungan informasi sesaat. Penyalahgunaan teknologi *deepfake* selama periode Pemilu 2024 serta misinformasi soal pengungsi Rohingya di Aceh pada akhir 2023 menjadi bukti nyata eskalasi ancaman ini terhadap stabilitas sosial. Secara psikologis, Szabo (2007) membuktikan bahwa distribusi informasi negatif bertindak sebagai pemicu peningkatan emosi negatif dan kecemasan yang signifikan. Hal ini dipertegas oleh Chaidir (dalam InfoPublik, 2023) yang menyatakan bahwa hoaks merupakan faktor utama pemicu perpecahan umat dan disintegrasi sosial. Kebohongan yang diproduksi secara massal perlahan merusak kepercayaan publik (*public trust*), baik terhadap sesama warga maupun institusi resmi, sehingga tatanan sosial menjadi sangat rapuh dan mudah diadu domba.

Meski berbagai kampanye literasi digital sudah sering digencarkan, nyatanya masih ada "lubang besar" dalam pendekatan yang dilakukan selama ini. Kolaborasi antara Mastel, APJII, dan Mafindo memang telah menghadirkan langkah responsif melalui berbagai perangkat teknis seperti aplikasi pelacakan hoaks. Namun, upaya tersebut perlu diimbangi dengan peningkatan kualitas pendidikan dan budaya baca agar literasi digital mampu membentuk benteng kognitif dalam diri masyarakat (Kementerian Kominfo RI, 2017). Dalam kaitan inilah, prinsip *tabayyun* hadir sebagai landasan moral yang sangat relevan. Mengacu pada refleksi Buya Hamka terhadap kisah al-Walid bin Uqbah, kegagalan memverifikasi informasi bukan hanya masalah teknis, melainkan pangkal kezaliman. Oleh karena itu, *tabayyun* harus diposisikan sebagai 'filter etika' yang memastikan setiap informasi tetap berpijak pada nilai kebenaran serta kemaslahatan umat (Lestari dalam MUI, 2023).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif melalui pendekatan studi pustaka (*library research*). Metode ini dipilih karena fokus utama kajian adalah mengeksplorasi

konsep etika komunikasi Islam dan fenomenologi hoaks melalui berbagai literatur yang kredibel. Data yang dikumpulkan bersifat sekunder, yang diperoleh dari penelusuran draf draf jurnal ilmiah, buku teks, artikel akademik, serta dokumen resmi pemerintah dan lembaga keagamaan seperti Fatwa MUI.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber data normatif yang berasal dari Al-Qur'an dan Hadis sebagai landasan utama dalam membedah prinsip *tabayyun*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara dokumentasi, yakni menghimpun literatur yang relevan guna mendukung kedalaman pembahasan. Data tersebut kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*) secara deskriptif untuk merumuskan sintesis antara tantangan teknologi digital dengan solusi etika Islam yang ditawarkan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dinamika Hoaks Dan Misinformasi Di Ruang Digital

Realitas ruang digital saat ini bukan sekadar saluran informasi, melainkan medan tempur persepsi yang sangat rumit. Fatih dkk. (2024) menggarisbawahi bahwa kita sedang hidup di era di mana 'kebenaran' sering kali dikalahkan oleh narasi yang menyentuh emosi. Kondisi ini diperparah oleh kerja algoritma media sosial yang secara teknis menciptakan *filter bubble*, sehingga pengguna cenderung hanya terpapar pada informasi yang memvalidasi keyakinan mereka sendiri (*bias konfirmasi*). Alhasil, hoaks yang bersifat doktriner menjadi sangat mudah diterima tanpa adanya sikap kritis. Oleh karena itu, peningkatan literasi digital yang mencakup keterampilan teknis dan kognitif menjadi kebutuhan mendesak untuk membangun ketahanan masyarakat terhadap disinformasi.

Melihat tren sepanjang 2023 hingga 2024, penyebaran hoaks saat ini tidak lagi sekadar aksi iseng individu, melainkan sudah melibatkan aktor intelektual dengan agenda strategis tertentu. Hal yang cukup memprihatinkan adalah bagaimana misinformasi sering kali dipoles menggunakan atribut keagamaan agar terlihat lebih otoritatif dan meyakinkan di mata masyarakat awam. Strategi ini biasanya diperkuat dengan penggunaan judul yang bombastis atau *clickbait* sebagai pintu masuk untuk menggiring opini publik ke arah yang keliru. Pola ini terbukti sangat efektif karena masyarakat cenderung lebih cepat merespons dan membagikan berita yang mengandung unsur ancaman atau harapan palsu dibandingkan konten edukatif, sehingga isu politik dan agama tetap menjadi komoditas utama yang mampu memicu ledakan emosi massa secara instan.

Kondisi tersebut semakin diperumit dengan kehadiran teknologi kecerdasan buatan (AI) yang mulai disalahgunakan untuk menciptakan *deepfake* atau narasi palsu yang terlihat sangat nyata. Tantangan terbesarnya terletak pada kecepatan sebaran informasi palsu yang tercatat mencapai enam kali lebih cepat daripada proses klarifikasinya sendiri. Akibatnya, sebuah informasi yang salah sering kali sudah telanjur dianggap sebagai kebenaran kolektif sebelum sempat dibantah, sehingga memicu kerusakan kognitif yang sulit untuk diperbaiki.

Masalah sosiologis seperti rendahnya literasi digital juga memperburuk situasi ini, di mana niat baik seseorang untuk berbagi informasi justru berakhir menjadi penyebaran fitnah. Fenomena ini menunjukkan bahwa tanpa adanya filter etika yang kuat, niat baik saja tidak cukup untuk menjaga kejujuran informasi di ruang publik.

Tinjauan Etika Komunikasi Islam

Islam sebenarnya telah menawarkan protokol komunikasi yang sangat ketat melalui konsep Komunikasi Qur'ani. Namun, dalam realitas digital saat ini, sering kali terdapat jurang pemisah antara teks keagamaan dengan perilaku netizen. Dr. Mukhtar Hadi (2023) menekankan bahwa cara seseorang berbahasa adalah cerminan langsung dari karakter dan sopan santunnya. Prinsip *Qaulan Sadida* seharusnya menjadi fondasi utama, di mana setiap informasi harus akurat dan jujur. Sayangnya, ambisi untuk menjadi yang "tercepat" dalam menyebarkan informasi sering kali membuat orang mengabaikan kejujuran demi mengejar viralitas.

Fenomena ini mengungkap ironi sosiologis yang tajam: banyak orang mampu berkomunikasi secara prima dan lembut dalam urusan bisnis atau pelayanan jasa seperti di bank atau maskapai penerbangan namun justru kehilangan adab saat berinteraksi di ruang publik digital. Hal ini menunjukkan bahwa kesantunan sering kali hanya dijadikan "basa-basi" demi keuntungan ekonomi, bukan lahir dari karakter yang tulus. Padahal, Al-Qur'an telah merumuskan berbagai standar komunikasi, mulai dari *Qaulan Ma'rufan* (kata yang pantas dan baik), *Qaulan Layyina* (lemah lembut), hingga *Qaulan Baligha* (tepat sasaran). Menyebarkan berita tanpa verifikasi bukan sekadar kesalahan teknis, melainkan bentuk perilaku *kadzib* (pendusta) yang merusak integritas iman.

Lebih jauh lagi, terdapat tanggung jawab individual yang bersifat ukhrawi. Setiap gerakan jempol di atas layar ponsel tidak terlepas dari pengawasan Ilahi. Ketiadaan sensor fisik di dunia maya sering kali membuat orang lupa akan batasan moral, sehingga rekonstruksi etika Islam di ruang digital bukan sekadar soal literasi, melainkan soal menghidupkan kembali rasa *muraqabah* (merasa diawasi Tuhan). Menjaga jari (*hifdzul isba'*) kini menjadi manifestasi nyata dari menjaga lidah (*hifdzul lisan*) di era modern. Pada akhirnya, kualitas diskursus kita di media sosial adalah standar nyata dari kualitas karakter bangsa kita di masa depan.

Urgensi dan Mekanisme Prinsip Tabayyun

Bagian inti dari kajian ini adalah mendudukan kembali *Tabayyun* sebagai instrumen intelektual dan metode verifikasi, bukan sekadar imbauan moral. Dalam QS. Al-Hujurat ayat 6, terdapat peringatan keras mengenai sosok "orang fasik" sebagai pembawa berita, yang dalam konteks modern bisa direpresentasikan sebagai akun anonim atau portal berita provokatif. Implementasi *Tabayyun* masa kini harus bertransformasi menjadi lebih teknis; tidak cukup lagi hanya bertanya "siapa yang bicara", tapi harus menelusuri sumber aslinya secara mendalam.

Mekanisme *tabayyun* digital mencakup audit sumber untuk memastikan kredibilitas redaksi, serta melakukan triangulasi informasi dengan membandingkan satu berita pada minimal tiga sumber yang memiliki reputasi tinggi. Literatur menunjukkan bahwa masyarakat yang malas membandingkan sumber cenderung lebih mudah terdoktrin oleh satu narasi tunggal. Selain itu, penting bagi pengguna untuk memiliki "jeda reflektif" sebelum menekan tombol *share*. Jeda ini adalah bentuk pengendalian diri (*jihad nafsu*) untuk mengevaluasi manfaat dan mudarat dari sebuah informasi.

Terakhir, *tabayyun* juga berarti keberanian untuk mengakui kesalahan dan melakukan klarifikasi jika informasi yang telanjur dibagikan ternyata keliru. Di tengah ego digital yang tinggi, melakukan ralat atau *ishlah* adalah kewajiban untuk mencegah dampak negatif yang lebih luas. Inilah yang menjadikan *tabayyun* sebagai perangkat pertahanan diri sekaligus bentuk kesalehan sosial yang sangat krusial di tengah banjir informasi saat ini.

Dampak Pengabaian Tabayyun terhadap Tatanan Sosial

Bahaya terbesar dari pengabaian *tabayyun* adalah disintegrasi sosial yang mendalam yang pada akhirnya mengancam stabilitas dan ketahanan nasional. Sarjito & Sarjito (2024) menjelaskan bahwa misinformasi memiliki daya rusak yang eksalatif, mampu mengubah kawan menjadi lawan dalam hitungan detik. Ketika hoaks bermuatan sentimen agama atau suku menyebar tanpa klarifikasi, polarisasi politik akan semakin tajam, yang sering kali berujung pada persekusi digital atau konflik fisik di dunia nyata. Banyak konflik horisontal di Indonesia yang berawal dari percikan informasi di grup WhatsApp yang tidak pernah melewati proses *tabayyun*. Fenomena ini sering saya temui sendiri di grup keluarga, di mana informasi yang belum jelas kebenarannya sering dibagikan begitu saja hanya karena judulnya provokatif.

Ketidakmampuan kita dalam memverifikasi berita akhirnya memicu rasa saling tidak percaya atau *social distrust* yang kronis, baik antar sesama warga maupun terhadap pemerintah. Fitnah digital yang dibiarkan akan merusak reputasi seseorang secara permanen karena jejak digital yang sangat sulit dihapus. Selain itu, pengabaian ini menurunkan kualitas demokrasi kita; ruang publik yang seharusnya mencerahkan justru berubah menjadi medan tipu daya. Dampak psikologisnya pun nyata, di mana korban hoaks sering mengalami trauma hingga pengucilan sosial. Hal ini membuktikan bahwa menjaga kebenaran informasi melalui literasi digital dan penguatan regulasi bukan sekadar urusan teknis, melainkan upaya menjaga martabat manusia dan integritas tatanan sosial.

Strategi Literasi Digital Berbasis Nilai Islam

Dari seluruh rentetan pembahasan ini, kita bisa melihat bahwa literasi digital sejatinya tidak boleh hanya berhenti pada kecakapan teknis semata. Dimensi etis dan spiritual justru menjadi kunci utamanya. Prinsip "*Ethics before Sharing*" perlu dijadikan paradigma utama bagi setiap Muslim saat berinteraksi di ruang siber. Sebenarnya, solusi jangka panjang untuk memerangi disinformasi tidak akan cukup jika hanya mengandalkan

regulasi pemerintah; kita butuh internalisasi nilai yang lebih mendalam, atau yang bisa kita sebut sebagai "Digital Takwa."

Langkah awal yang paling krusial sebenarnya dimulai dari unit terkecil, yaitu keluarga. Di sini, orang tua memegang peranan penting untuk memberikan teladan dalam menyaring informasi sebelum menjadikannya bahan pembicaraan di rumah. Jika budaya literasi di lingkungan rumah tangga sudah kuat, setiap individu akan memiliki insting kritis yang lebih terlatih sehingga tidak mudah goyah oleh serangan hoaks di media sosial (Kementerian Kominfo RI, 2017). Kedekatan emosional dalam keluarga menjadi ruang *tabayyun* yang paling efektif untuk mengklarifikasi berbagai isu yang berkembang di grup-grup pesan instan.

Sejalan dengan itu, peran tokoh agama juga sangat dibutuhkan untuk menyuarakan kembali etika berkomunikasi yang praktis, termasuk panduan hukum Islam mengenai bahaya berita bohong. Dengan narasi yang menyentuh sisi spiritual, pengguna media sosial diharapkan memiliki kesadaran bahwa setiap aktivitas digital mereka adalah cerminan karakter diri yang akan dipertanggungjawabkan di akhirat nanti (Hadi, 2023). Rasa *muraqabah* (merasa diawasi Tuhan) inilah yang menjadi "rem otomatis" sebelum jempol kita bergerak menyebarkan sesuatu yang belum jelas kebenarannya.

Tantangan ini juga butuh kerja sama antara akademisi, praktisi media, dan ulama untuk memproduksi konten tandingan yang berbasis fakta. Tujuannya adalah untuk "membanjiri" ruang digital dengan konten berkualitas, sehingga ruang bagi hoaks dan misinformasi secara alami akan menyempit dengan sendirinya (Sarjito & Sarjito, 2024). Pada akhirnya, ketaatan pada nilai agama harus berjalan beriringan dengan kepatuhan pada hukum negara seperti UU ITE. Dengan perpaduan antara kesadaran spiritual dan ketaatan hukum, *tabayyun* tidak lagi dianggap sebagai beban yang kaku, melainkan sebuah *survival skill* atau keterampilan bertahan hidup yang esensial untuk menjaga kewarasan kita di tengah badai informasi saat ini.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, jelas bahwa persoalan hoaks di era digital bukan sekadar masalah teknis, melainkan cerminan dari krisis etika komunikasi. Banjir informasi yang tidak terkendali telah menciptakan kelelahan kognitif yang membuat masyarakat mudah terjebak dalam narasi emosional. Dalam perspektif Islam, fenomena ini merupakan pelanggaran terhadap prinsip *Qaulan Sadida*. Prinsip *Tabayyun* hadir sebagai metodologi wajib untuk memutus rantai fitnah digital melalui langkah teknis seperti audit sumber dan triangulasi informasi. Pengabaian terhadap prinsip ini terbukti merusak tatanan sosial dan memicu perpecahan. Oleh karena itu, memadukan kecanggihan teknologi

dengan "Digital Takwa" adalah jalan utama untuk menciptakan ekosistem siber yang lebih sehat dan beradab.

Saran

Melihat kondisi yang semakin mengkhawatirkan, ada beberapa langkah strategis yang perlu diupayakan secara kolaboratif. Pertama, bagi para pengguna media sosial, sangat penting untuk membudayakan praktik "Saring Sebelum Sharing" dan membiasakan diri mengambil jeda reflektif sebelum menyebarkan informasi apa pun. Kedua, bagi para pendidik dan tokoh agama, narasi dakwah perlu diarahkan pada etika bermedia sosial yang praktis agar umat memahami bahwa setiap aktivitas digital memiliki konsekuensi moral dan spiritual. Selain itu, pemerintah diharapkan terus memperkuat sarana verifikasi fakta yang mudah diakses oleh masyarakat awam. Terakhir, bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk melakukan kajian lapangan guna mengukur sejauh mana efektivitas penerapan prinsip *tabayyun* dalam mengubah perilaku netizen secara nyata, sehingga solusi yang ditawarkan dapat memberikan dampak yang lebih luas bagi keselamatan peradaban digital.

DAFTAR REFERENSI

- Adrian, G. A. (2024, Januari 3). *Deepfake: Bakal dalang hoax jelang Pemilu 2024?* Universitas Muhammadiyah Surakarta. <https://www.ums.ac.id/berita/unggulan/deep-fake-bakal-dalang-hoax-jelang-pemilu-2024>
- Fatih, M., Santoso, S., Widodo, H. R. P., Pratomo, S. A., Febrinazahra, M., Ananda, D. P., & Nurjanah, N. (2024). Analisis teori kebenaran pengetahuan dan dampak algoritma terhadap penyebaran hoaks di media sosial. *JTIK (Jurnal Teknik Informatika Kaputama)*, 8(2), 177–186. <https://doi.org/10.59697/jtik.v8i2.829>
- Hadi, M. (2023, 16 Januari). *Penggunaan Bahasa dan Karakter Diri*. Metrouniv.ac.id. <https://www.metrouniv.ac.id/artikel/penggunaan-bahasa-dan-karakter-diri/>
- InfoPublik. (2023, 31 Juli). *Berita Hoaks Timbulkan Perpecahan di Tengah Masyarakat*. Diakses pada (2 mei 2026), dari <https://infopublik.id/kategori/nusantara/764833/berita-hoaks-timbulkan-perpecahan-di-tengah-masyarakat>
- Irhamdhika, G. (2022). Mitigasi hoaks di era disrupsi melalui literasi digital. *J-IKA: Jurnal Ilmu Komunikasi Administrasi*, 9(1), 39–46. <https://doi.org/10.31294/kom.v9i1.12610>
- Johnson, P. M. (2005). *A glossary of political economy terms*. Auburn University. https://www.auburn.edu/~johnspm/gloss/law_of_diminishing_returns
- Kementerian Komunikasi dan Informatika RI. (2017, 10 Januari). *Rendahnya Literasi Digital Jadi Penyebab Penyebaran Berita Hoax*. Diakses pada (2 mei 2026), dari <https://www.komdigi.go.id/berita/pengumuman/detail/rendahnya-literasi-digital-jadi-penyebab-penyebaran-berita-hoax>
- Lestari, F. A. (2023, 31 Juli). *Tabayyun: Kunci Hadapi Belantara Informasi dan Pesan Bnya Hamka*. Majelis Ulama Indonesia. Diakses pada (2 mei 2026), dari

<https://mui.or.id/baca/berita/tabayun-kunci-hadapi-belantara-informasi-dan-pesan-buya-hamka>

- Sarjito, A., & Sarjito, A. (2024). Hoaks, Disinformasi, dan Ketahanan Nasional: Ancaman Teknologi Informasi dalam Masyarakat Digital Indonesia. *Journal of Governance and Local Politics (JGLP)*, 6(2), 175–186. <https://doi.org/10.47650/jglp.v6i2.1547>
- SG, W. (2026, Maret 30). *Global Digital Reports 2026: Rata-rata Warga Indonesia Main Medsos 3 Jam Lebih Per Hari*. MedanAktual.com. <https://id.medanaktual.com/global-digital-reports-2026-rata-rata-warga-indonesia-main-medsos-3-jam-lebih-per-hari/>
- Szabo, A. & Hopkinson, K. L. (2007). Negative Psychological Effects of Watching the News in the Television: Relaxation or Another Intervention May Be Needed to Buffer Them!. *International Journal of Behavioral Medicine*, 14(2), 57-62.